

'JAGA SATRU' HALAU PENGEMIS DAN PENGAMEN

Parangtritis Diserbu Ribuan Wisatawan

BANTUL (KR) - Momentum liburan sekolah menjadi tonggak bangkitnya sektor wisata di Kabupaten Bantul setelah hampir dua tahun terseok-seok dihantam badai pandemi Covid-19. Lonjakan kunjungan juga sangat signifikan terjadi di semua destinasi.

Sementara Jaga Satru Parangtritis, organisasi bentukan warga Mancingan dari unsur masyarakat, pemuda terus bergerak untuk menghalau hadirnya pengamen-pengemis di Pantai Parangtritis.

"Per tanggal 20-26 Juni 2022, kami mencatat sebanyak 66.244 wisatawan masuk ke Bantul dengan pendapatan sebesar Rp 664,3 juta. Jika dirinci lagi akhir pekan lalu tang-

gal 24-26 Juni 2022 jumlah wisatawan yang berkunjung 43.669 dengan pendapatan Rp 424.892.750," ujar Kasi Promosi dan Informasi Wisata Dinas Pariwisata Bantul, Markus Purnomo Adi SE, Senin (27/6).

Berdasarkan data dalam kurun waktu sepekan terakhir, jumlah kunjungan wisatawan ke Bantul melonjak hingga 42% dibandingkan pekan sebelumnya. Kenaikan yang

sulit dibendung tersebut sebagai imbas liburan sekolah.

Sejauh ini Pantai Parangtritis masih memimpin jadi objek paling banyak menyedot wisatawan dibanding lokasi lokasi lainnya. Dalam sepekan terakhir Parangtritis diserbu 59.731 wisatawan. Sementara wisatawan didominasi dari Jawa Tengah 48%, Jawa Timur 22%, Jawa Barat 15%, DKI 2% dan wisa-



SAR Pantai Parangtritis Kretek Bantul menghalau wisatawan agar menepi ke pantai.

tawan lokal 7%. Wisatawan dari luar Jawa dari Lampung 2,3% serta Barat 0,9%. Bantul dan Sumatera "Data tersebut kami

rekap dari reservasi aplikasi visitingjogja di kunjungan Pantai Parangtritis, totalnya 10.022 wisatawan," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator SAR Satlinmas Wilayah 3 Bantul, Muhammad Arief Nugraha SE, mengatakan wisatawan di pantai selatan Bantul diminta meningkatkan kewaspadaan. Karena gelombang kisaran 4-6 meter berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi itu mesti jadi perhatian dan kewaspadaan wisatawan yang datang pantai pesisir selatan Bantul.

(Roy)-d

PERTAMA DI YOGYAKARTA

BPN Bantul Lakukan Inovasi 'Belahanhati'



Proses penandatanganan kontrak pelayanan Belahanhati di BPN Bantul.

BANTUL (KR) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul menyelenggarakan Focus Group Discussion Citizen's Charter atau kontrak layanan dalam melakukan inovasi Bantuan Layanan Perubahan Hak Atas Tanah Sehari (Belahanhati) di aula kantor setempat, Senin (27/6).

Kepala BPN atau Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Iskandar Subagya SH MHum, mengungkapkan mulai Juni 2022 ini BPN Bantul membuat inovasi baru untuk pelayanan kepada masyarakat dalam perubahan hak atas tanah dari status Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), dalam sehari selesai. "Inovasi baru ini kami namakan program Belahanhati (Bantuan Layanan Perubahan Hal Tanah Sehari) dan ini baru yang

pertama kali di DIY," papar Iskandar.

Sementara sesuai kontrak layanan dibatasi minimal 20 dan maksimal 30 pemohon. Pelayanan berada di lokasi, tanda tangan dan penyerahan juga di lokasi. Dalam waktu sehari selesai, biaya hanya Rp 50.000 dan masuk kas negara.

Untuk mengawali pelayanan Belahanhati, dimulai di Perumahan Padma Residence Bangunjiwo Kasihan sebanyak 20 pemohon. Selanjutnya akan disesuaikan dengan penguasaan permohonan. Kontrak layanan ini sementara berlaku sampai akhir tahun 2022 untuk selanjutnya bisa diperpanjang setiap satu atau dua tahun.

Proses kontrak pelayanan tersebut dipandu Penelitian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Yogyakarta, Triastuti Setyaningrum SIP

MSc, sebagai saksi dari Dinas PUPK, BPKPAD, Dinas PMPTST, Tokoh Masyarakat, Paguyuban Padma Residence, Disdukcapil dan wakil media.

Triastuti mengapresiasi langkah BPN Bantul dengan membuat inovasi baru yakni Belahanhati. "Ini langkah yang bagus dan berani juga baru pertama di DIY, bahkan sangat mungkin yang pertama di Indonesia," ungkapnya.

Menurut Triastuti, layanan ini sangat membantu masyarakat, terutama di kalangan perumahan. "Dengan inovasi BPN yang baru ini masyarakat juga menjadi mengerti ternyata proses perubahan hak atas tanah itu mudah dan murah," pungkask Triastuti.

Citizens charter suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat pelayanan. Mendorong penyedia layanan untuk bersama dengan pengguna layanan dan pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder lainnya untuk menyepakati bersama jenis, prosedur, waktu serta cara pelayanan. Kesepakatan tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia layanan, pengguna layanan dan stakeholder.

(Jdm)-d

TAK SEBANDING DENGAN POPULASI SAPI

Bantuan Vaksin PMK untuk Zona Hijau

BANTUL (KR) - Pemkab Bantul mendapatkan alokasi sebanyak 300 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) dari Pemerintah Pusat untuk disuntikkan pada hewan ternak di daerah ini. Vaksin tersebut akan diberikan untuk sapi potong yang ada di zona hijau atau kecamatan yang nihil kasus PMK, agar populasi ternak sapi tetap aman.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul, Joko Waluyo, Senin (27/6). "Sekarang baru kami data, vaksin itu akan diprioritaskan untuk sapi potong di daerah hijau dan daerah hijau untuk kasus PMK ada di wilayah barat," ungkapnya.

Joko Waluyo mengatakan, jumlah vaksin tersebut masih jauh dari kebutuhan untuk dalam penanganan wabah PMK yang telah menjadi pandemi, karena total

populasi sapi di Bantul mencapai 72 ribu ekor. "Makanya dapat 300 dosis itu kami masih repot membayarnya, karena populasi sapi kita 72 ribu lebih," jelasnya.

Sementara itu, Joko mengatakan, kasus PMK pada hewan ternak yang ditemukan di wilayah Bantul hingga Minggu (26/6) malam sebanyak 2.109 ternak yang secara klinis positif terjangkit virus yang menyerang mulut dan kuku itu. "Kemudian yang mati 10 ekor, potong paksa sebanyak 50 ekor, dan yang sembuh sejumlah 312 ekor," ujarnya.

Kasus PMK pada ternak tersebut tersebar di beberapa kecamatan yang merupakan sentra ternak sapi. "Beberapa kecamatan merah kasus PMK di Bantul yaitu Kecamatan Kretek, Pundong, Jetis, Pleret dan Piyungan," jelasnya.

Sementara itu, Pemkab Bantul

juga masih menunggu surat resmi dari Pemerintah Pusat terkait pemberian ganti rugi kepada peternak yang sapiunya dimusnahkan akibat terkena PMK.

"Dengan demikian, kami belum bisa memberikan informasi kepada masyarakat, karena sampai sekarang belum ada surat resmi," tuturnya.

Diakui surat resmi tersebut cukup penting sebagai acuan Pemerintah Daerah mengusulkan ganti rugi. Selain itu juga akan diketahui kriteria yang seperti apa sapi yang dimusnahkan akibat terkena PMK.

"Kriterianya bagaimana sampai sekarang belum ada resminya, apakah itu yang mati atau potong paksa, jadi kami belum bisa menjelaskan, kalau sudah ada surat, kita langsung mengusulkan sesuai dengan kriteria," ujarnya. (Roy)-d

SIHONO KETUA DPD PPNI BANTUL

Perawat Terdepan dalam Pelayanan Kesehatan



Sihono secara aklamasi terpilih sebagai Ketua DPRD PPNI Bantul dalam Musda ke X.

BANTUL (KR) - Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Kabupaten Bantul menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke X di KJ Hotel, Sabtu (25/6). Sihono SKep Ns terpilih secara aklamasi terpilih sebagai Ketua DPD PPNI Kabupaten Bantul periode 2022-2027 untuk menggantikan Sri Rejeki Arum SKM MM yang sudah menjabat ketua dua kali berturut-turut.

Musda dibuka Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih, dihadiri Kepala Dinkes Bantul Agus Budi Raharjo SKM MKes, Ketua DPD PPNI DIY Tri Prabowo SKP MSc, Ketua organisasi profesi kesehat-

an se-Kabupaten Bantul dan undangan lainnya.

Bupati mengungkapkan, perawat sebagai pihak yang terdepan dalam melakukan layanan kesehatan. Jumlah perawat di Bantul mencapai lebih dari 2.800 orang dan masyarakat menggantungkan pelayanan kesehatan dari perawat, karena itu perawat perlu meningkatkan kompetensi kemampuannya. Perawat juga sebagai profesi strategis untuk mencapai visi kesehatan Kabupaten Bantul.

Maka dengan momentum musyawarah ini hendaknya menjadi kesempatan untuk merefleksikan dan mengawalasi pelaksanaan kegiatan serta program kerja yang telah di-

laksanakan. Di sisi lain, Bupati mengimbau kepada PPNI untuk senantiasa meningkatkan solidaritasnya. Sebab masing-masing anggota memiliki tanggungjawab yang sama atas kemajuan organisasi.

"Maka soliditas hendaknya tidak hanya berlaku secara internal dalam kehidupan berorganisasi, tapi juga di lapangan dalam menjalankan profesi sebagai perawat. Terutama dalam situasi pandemi yang masih kita hadapi, dan situasi medis lainnya yang membutuhkan koordinasi cepat. Karena profesi perawat sangat erat hubungannya dengan keselamatan dan nyawa manusia," ungkapnya.

Sementara Sihono menjelaskan, Musda ini merupakan agenda 5 tahunan yang wajib dilaksanakan sesuai AD/ART PPNI. Tapi karena ada pandemi Covid-19 sehingga Musda sempat tertunda. "Namun demikian tidak menyurutkan semangat dan perjuangan kami bersama organisasi profesi kesehatan sebagai garda terdepan bisa saling bahu-membahu dalam mewujudkan masyarakat sehat," pungkask Sihono. (Jdm)-d

Kedaulatan Rakyat
EPAPER
www.kr.co.id

Berlangganan Scan Barcode

Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggaman tangan Anda. Sekarang.